

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik Atau Arena Konflik: (Analisis Habermas Dalam Kasus Amsal Sitepu Pada Platform X)

Siti Patimah¹, Irfan Haniful Qoyyim², Feggy Nurdiansyah³, Dono Darsono⁴, Asep Iwan Setiawan⁵

^{1),2),3)4),5)}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail correspondent: azzahraf255@gmail.com irfanhq20@gmail.com feggy.nhumasjabar@gmail.com donodarsono2727@gmail.com, iwanfidkom@uinsgd.ac.id

Received: 22-03-2026

Revised: 25-03-2026

Accepted: 10-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Public Sphere, Jürgen Habermas, Amsal Sitepu, Platform X.

Kata kunci:

Ruang Publik, Jürgen Habermas, Amsal Sitepu, Platform X.

Social media as a digital public sphere does not always produce rational discourse, but is often dominated by emotion, opinion fragmentation, and echo chambers. This issue is evident in the Amsal Sitepu case that went viral on platform X and triggered widespread public debate. This study aims to analyze the discourse using Jürgen Habermas's public sphere theory. It employs a descriptive qualitative method with critical discourse analysis and virtual ethnography. The findings show that communication is predominantly emotional-subjective, although emancipatory potential emerges through the communicative power of civil society. This study concludes that social media is ambivalent: it expands participation but remains prone to communication distortion, thus requiring more rational and deliberative discourse.

Abstrak.

Media sosial sebagai ruang publik digital tidak selalu menghadirkan diskursus rasional, tetapi sering didominasi oleh emosi, fragmentasi opini, dan echo chamber. Problematika ini terlihat dalam kasus Amsal Sitepu yang viral di platform X dan memicu perdebatan publik luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus tersebut menggunakan teori ruang publik Jürgen Habermas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis dan etnografi virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi didominasi oleh pola emosional-subjektif, meskipun terdapat potensi emansipatoris melalui kekuatan komunikatif masyarakat sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial bersifat ambivalen: membuka partisipasi publik, namun rentan terhadap distorsi komunikasi, sehingga perlu diarahkan pada diskursus yang lebih rasional dan deliberatif.

PENDAHULUAN

Transformasi teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi politik dari model tradisional menuju masyarakat jejaring (*network society*) yang sangat dinamis. Dalam diskursus kontemporer, media sosial sering kali diposisikan sebagai "digital public sphere" baru yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara otonom dalam membentuk opini publik. Jürgen Habermas mempostulatkan bahwa ruang publik yang sehat harus didasarkan pada tindakan komunikatif yang bertujuan mencapai pemahaman bersama melalui argumentasi rasional-kritis. Namun, dalam pandangan terbarunya mengenai era digital, Habermas (2022) memperingatkan bahwa platform media sosial sering kali memicu fragmentasi berbasis emosi, bukan deliberasi rasional, yang berujung pada kemunduran struktural ruang publik baru. Idealisme ini menghadapi tantangan besar berupa algoritma yang menciptakan ruang gema (*echo chamber*), polarisasi opini yang tajam, serta pergeseran dari rasionalitas komunikatif menuju rasionalitas strategis yang manipulatif.

Konteks ruang publik digital di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Lim (2017) menyoroti bahwa media sosial di Indonesia kerap memfasilitasi pembentukan "enklave algoritmik" (kantong-kantong algoritma) yang mengamplifikasi sentimen tribalisme dan emosi massa dibandingkan diskusi substantif. Kasus kriminalisasi Amsal Sitepu, seorang pekerja kreatif yang terjerat masalah administratif birokrasi hukum, menjadi fenomena spesifik yang menggambarkan ketegangan tersebut. Kasus ini mencuat bukan melalui jalur formal peradilan, melainkan melalui narasi-narasi viral di platform X. Dalam perspektif Habermas, fenomena ini menunjukkan adanya "kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem," di mana birokrasi hukum yang instrumental mengancam kehidupan konkret warga negara. Tapsell (2017) mencatat bahwa dalam ekosistem digital Indonesia yang oligarkis, masyarakat sipil sering kali menggunakan media sosial sebagai satu-satunya senjata (*counter-hegemony*) untuk melawan ketidakadilan sistemik.

Para akademisi telah banyak mengkaji media sosial sebagai ruang publik baru. Namun, literatur akademik masa kini masih menyisakan celah penelitian yang spesifik. Kebanyakan peneliti hanya fokus mengevaluasi aktivisme digital secara umum. Mereka jarang mengaitkan dinamika ini dengan distorsi struktural akibat campur tangan algoritma platform atau logika media sosial (Van Dijck & Poell, 2013). Celah ini terlihat sangat jelas ketika publik membedah validitas klaim hukum secara daring. Pengguna mencampuradukkan ekspresi emosional yang meledak-ledak dengan logika prosedural hukum yang kaku. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi intervensi viralitas kasus hukum di media sosial secara kritis. Evaluasi ini bertujuan membuktikan apakah fenomena tersebut benar-benar mendukung iklim demokrasi deliberatif atau justru mereduksi asas keadilan menjadi tontonan konsumsi emosi dangkal belaka.

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik: (Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika ruang publik ini untuk memberikan pijakan empiris. Penelitian pertama mengkaji fenomena keadilan berbasis viralitas dalam sistem hukum di Indonesia. Studi ini mengungkap mekanisme tekanan publik di media sosial dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Hasil penelitian membuktikan bahwa viralitas sebuah kasus hukum lebih sering bergantung pada kekuatan narasi emosional serta intervensi pemengaruh daring daripada tingkat urgensi hukum itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan kegagalan ruang digital dalam mencapai idealisme deliberasi rasional Habermas. Namun, kajian tersebut hanya mengevaluasi tekanan media sosial terhadap otonomi hakim secara makro. Kajian itu belum membedah interaksi linguistik teks digital dan adu argumen prosedural oleh masyarakat awam seperti fokus utama dalam artikel ini. (Zaidatul Azkiya, 2025).

Penelitian kedua memetakan problematika ideologi dalam ruang publik digital dan benturannya dengan teori demokrasi deliberatif Habermas. Jemadin dan Tahamin membuktikan adanya penurunan drastis kualitas deliberasi publik di ranah digital. Serangan personal, simplifikasi isu yang kompleks, dan penyebaran disinformasi yang masif mendominasi diskursus digital saat ini dan memicu degradasi tersebut. Kajian mereka berhasil memformulasikan ancaman makro bagi partisipasi warga negara. Titik pembeda penelitian ini justru terletak pada ketajaman objek analisisnya. Penelitian ini membedah secara mikroskopis kasus spesifik Amsal Sitepu pada platform X. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan pelacakan langsung terhadap benturan antara argumentasi rasional hukum dan luapan kemarahan publik yang murni terpicu oleh logika viralitas platform X, (Jemadin, S., 2026).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembentukan persepsi publik terhadap kasus Amsal Sitepu pada platform X dengan menggunakan pisau analisis teori ruang publik Jürgen Habermas. Fokus utama penelitian terletak pada klasifikasi tindakan komunikasi pengguna—apakah berorientasi pada pencapaian kesepahaman (*mutual understanding*) atau sekadar pengaruh strategis—serta melihat bagaimana "kekuatan komunikatif" mampu menandingi kekuasaan administratif negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang menggabungkan perspektif Habermasian dengan kerangka metodologis analisis teks dari Fairclough (2013) dan Van Dijk (2008). Pendekatan ini dipilih untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks, serta menganalisis klaim validitas (*validity claims*) dalam komunikasi pengguna—yakni aspek kebenaran faktual, ketepatan normatif, dan kejujuran ekspresif.

Data penelitian bersumber dari aktivitas digital di platform X yang mencakup postingan utama, hasil pemosting ulang (*repost*), dan kolom komentar pada akun-akun yang secara aktif membahas kasus Amsal Sitepu, seperti @vita_AVP dan @WagimanDeep212_. Teknik pengumpulan data dioperasikan melalui etnografi virtual (*virtual ethnography*), di mana peneliti melibatkan diri sebagai pengamat dalam lingkungan internet untuk menangkap konteks sosiokultural dari interaksi digital yang terjadi secara otentik (Hine, 2015).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) Identifikasi dan reduksi data teks berdasarkan relevansi teori; (2) Kategorisasi interaksi ke dalam pola rasional-prosedural, reflektif, atau emosional-subjektif; dan (3) Interpretasi hasil temuan untuk menjelaskan fenomena kolonisasi dunia-kehidupan serta pembentukan kekuatan komunikasi digital dalam melawan hegemoni birokrasi penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa interaksi pengguna dalam merespons diskursus kasus Amsal Sitepu di platform X dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama tindakan komunikasi, yaitu: (1) rasional-prosedural, (2) reflektif-kritis, dan (3) emosional-subjektif. Analisis dilakukan terhadap postingan utama dan kolom komentar dari beberapa akun yang aktif membahas kasus tersebut, khususnya akun @vita_AVP dan @WagimanDeep212_.

Analisis Platform Media Sosial X dalam Membentuk Persepsi Publik Terhadap Kasus Amsal Sitepu

Berdasarkan observasi digital pada platform X terhadap diskursus kasus Amsal Sitepu, penelitian ini menemukan bahwa interaksi pengguna tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap informasi melalui pemberitaan, tetapi juga sebagai proses produksi dan reproduksi makna yang kompleks. Postingan utama yang dianalisis menunjukkan bahwa konten yang berasal dari sumber jurnalistik mengalami transformasi ketika direproduksi melalui fitur repost (posting ulang). Dalam proses ini, pengguna tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menambahkan interpretasi subjektif yang mengandung penilaian normatif dan ekspresi emosional.

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik:
(Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

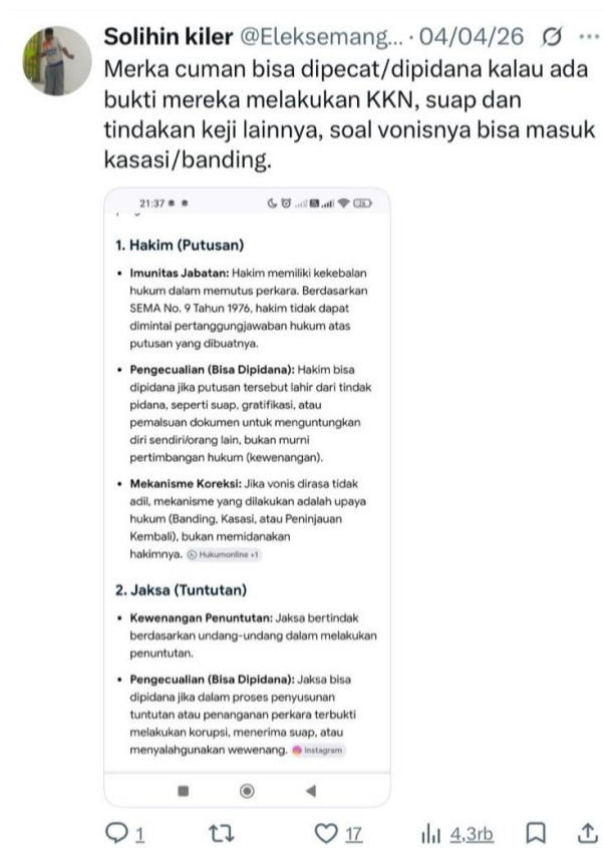
Gambar 1. Postingan akun @vita_AVP yang memproduksi konten jurnalistik dengan penambahan narasi subjektif bernuansa emosional (Sumber: Dokumentasi dari platform X, 2026)



Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari informasi berbasis fakta menuju opini berbasis persepsi. Dalam konteks ruang publik digital, kondisi tersebut sejalan dengan argumentasi Zizi Papacharissi yang menyatakan bahwa ruang publik virtual cenderung bersifat afektif (*affective publics*), di mana ekspresi emosi menjadi elemen dominan dalam pembentukan opini publik (Papacharissi, 2015).

Analisis terhadap kolom komentar menunjukkan adanya tiga pola komunikasi utama, yaitu rasional-prosedural, reflektif-kritis, dan emosional-subjektif. Komentar rasional-prosedural ditandai oleh upaya menjelaskan mekanisme hukum secara argumentatif, seperti penjelasan mengenai prosedur kasasi dan pembuktian dalam sistem peradilan. Sementara itu, komentar reflektif-kritis menunjukkan adanya upaya pengguna untuk mengaitkan kasus dengan kondisi sosial yang lebih luas, meskipun tidak selalu didukung oleh data empiris yang kuat.

Gambar 2. Contoh komentar pengguna yang menjelaskan prosedur hukum secara argumentatif dalam diskursus kasus Amsal Sitepu. (Sumber: Dokumentasi platform X, 2026)



Namun, temuan paling dominan adalah komentar emosional-subjektif, yang ditandai oleh generalisasi, ekspresi kemarahan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa diskursus yang terbentuk lebih dipengaruhi oleh emosi dibandingkan rasionalitas.

Gambar 3. Dominasi komentar emosional yang ditandai oleh generalisasi dan ekspresi ketidakpercayaan terhadap institusi hukum (Sumber: Dokumentasi platform X, 2026)



Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik: (Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

Untuk memperjelas temuan tersebut, penelitian ini menggunakan tabel coding sebagai instrumen analisis. Tabel ini mengkategorikan komentar berdasarkan indikator rasionalitas, struktur argumen, dan kecenderungan ekspresi subjektif. Komentar yang mengandung penjelasan berbasis prosedur hukum dikategorikan sebagai rasional-prosedural, sedangkan komentar yang berisi generalisasi tanpa dasar empiris dikategorikan sebagai emosional-subjektif.

Melalui analisis tersebut, terlihat bahwa kategori emosional-subjektif memiliki dominasi yang signifikan dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam struktur diskursus, di mana ekspresi afektif lebih menonjol dibandingkan argumentasi rasional. Selain itu, ditemukan pula indikasi kuat terbentuknya echo chamber, yaitu kondisi di mana opini yang seragam diperkuat secara berulang tanpa adanya tantangan dari perspektif alternatif.

Tabel 1. Coding analisis media sosial sebagai ruang publik

No	Kutipan Representatif	Kategori	Indikator	Interpretasi
1	“Harusnya dibuktikan dulu lewat kasasi”	Rasional-prosedural	Penjelasan Hukum	Mengarah pada argumentasi rasional
2	“Dulu sebelum viral juga banyak kasus kayak gini”	Reflektif-Kritis	Refleksi sosial	Membuka diskursus
3	“Aparat mah semuanya sama aja”	Emosional-Subjektif	Generalisasi	Distorsi komunikasi
4	“Percuma hukum, ujungnya duit”	Emosional-Subjektif	Sinisme	Kehilangan kepercayaan publik
5	“Ini jelas ada yang salah dari sistem”	Reflektif-Kritis	Kritik sistemik	Potensi deliberasi

Postingan @P3gEl ini terlihat memanfaatkan infrastruktur ruang publik digital X, akan tetapi mengkhianati substansi public sphere Habermas. Ia tidak membangun diskursus rasional, tidak menghadirkan subjek secara setara, dan tidak mendorong deliberasi. Sebaliknya, ia mencontohkan bagaimana media sosial hari ini lebih banyak berfungsi sebagai arena tontonan dan konsumsi emosi, bukan arena pembentukan opini publik yang deliberatif dan emansipatoris sebagaimana dicita-citakan Habermas.

Dalam bahasa Habermas: ini bukan communicative rationality, ini strategic rationality yang berselimut keterbukaan. Dengan demikian, yang beroperasi dalam postingan tersebut bukan terkait communicative rationality yakni tindakan komunikasi yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama (mutual understanding), melainkan strategic rationality yang membungkus dirinya dalam tampilan keterbukaan. Ini merupakan salah satu bentuk distorsi ruang publik yang paling sulit secara formal terbuka, namun secara substansial terkesan manipulatif.

Postingan @P3gEl ini terlihat memanfaatkan infrastruktur ruang publik digital X, akan tetapi mengkhianati substansi public sphere Habermas. Ia tidak membangun diskursus rasional, tidak menghadirkan subjek secara setara, dan tidak mendorong deliberasi. Sebaliknya, ia mencontohkan bagaimana media sosial hari ini lebih banyak berfungsi sebagai arena tontonan dan konsumsi emosi, bukan arena pembentukan opini publik yang deliberatif dan emansipatoris sebagaimana dicita-citakan Habermas.

Dalam bahasa Habermas: ini bukan communicative rationality, ini strategic rationality yang berselimut keterbukaan. Dengan demikian, yang beroperasi dalam postingan tersebut bukan terkait communicative rationality yakni tindakan komunikasi yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama (mutual understanding), melainkan strategic rationality yang membungkus dirinya dalam tampilan keterbukaan. Ini merupakan salah satu bentuk distorsi ruang publik yang paling sulit secara formal terbuka, namun secara substansial terkesan manipulatif.

Gambar 4. Postingan @P3gEl yang memposting ulang dalam diskursus kasus Amsal Sitepu (Sumber: Dokumentasi peneliti dalam platform X, 2026)



Postingan @P3gEl ini terlihat memanfaatkan infrastruktur ruang publik digital X, akan tetapi mengkhianati substansi public sphere Habermas. Ia tidak membangun diskursus rasional, tidak menghadirkan subjek secara setara, dan tidak mendorong deliberasi. Sebaliknya, ia mencontohkan bagaimana media sosial hari ini lebih banyak berfungsi sebagai arena tontonan dan konsumsi emosi, bukan arena pembentukan opini publik yang deliberatif dan emansipatoris sebagaimana dicita-citakan Habermas.

Dalam bahasa Habermas: ini bukan communicative rationality, ini strategic rationality yang berselimut keterbukaan. Dengan demikian, yang beroperasi dalam postingan tersebut bukan terkait communicative rationality yakni tindakan komunikasi yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama (mutual understanding), melainkan strategic rationality yang membungkus dirinya dalam tampilan keterbukaan. Ini merupakan salah satu bentuk distorsi ruang publik yang paling sulit secara formal terbuka, namun secara substansial terkesan manipulatif.

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik:
(Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

Gambar 5. Postingan akun @WagimanDeep212_ yang menampilkan framing naratif terhadap kasus Amsal Sitepu dengan kecenderungan persuasif dan emosional (Sumber: Dokumentasi peneliti dari platform X, 2026)



Sementara itu, dalam postingan @WagimanDeep212_ dalam kasus Amsal Sitepu yang merupakan konten kreator dan kedudukannya ialah seorang warga biasa yang masa depannya hancur akibat kesalahan administratif aparat adalah contoh dari perspektif Habermas yang sering disebut sebagai “kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem” (colonization of the lifeworld): birokrasi hukum yang seharusnya melindungi warga justru menghancurkan kehidupan konkret mereka.

Ketika postingan ini menjadi viral dan mendorong Kajari mengakui kesalahan di depan DPR RI, media sosial benar-benar berfungsi sebagai ruang publik emansipatoris yaitu tekanan opini publik yang terorganisir berhasil memaksa akuntabilitas institusional. Inilah yang oleh Habermas disebut sebagai “kekuatan komunikatif” (communicative power) yang mampu menandingi kekuasaan administratif.

Dalam perspektif Jürgen Habermas, pola komunikasi semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan strategis (strategic action), di mana komunikasi tidak diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama, melainkan untuk memengaruhi orientasi pemikiran audiens. Narasi yang

dibangun cenderung menyederhanakan kompleksitas kasus serta menekankan aspek tertentu secara berulang, sehingga membentuk persepsi kolektif yang relatif homogen.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa platform X sebagai ruang publik digital memiliki karakter yang ambivalen, yaitu membuka partisipasi publik secara luas, namun sekaligus mengalami distorsi komunikasi yang signifikan. Dalam perspektif Jürgen Habermas, ruang publik ideal mensyaratkan adanya tindakan komunikatif yang berorientasi pada pencapaian kesepahaman melalui argumentasi rasional (Habermas, 1984; 1987).

Namun, dominasi komentar emosional sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3 memperlihatkan bahwa komunikasi dalam ruang digital cenderung bergeser menuju tindakan strategis, di mana komunikasi digunakan untuk mengekspresikan posisi subjektif atau memengaruhi opini, bukan untuk mencapai pemahaman bersama. Hal ini mengindikasikan melemahnya rasionalitas komunikatif dalam diskursus digital.

Ketidakseimbangan ini dapat dianalisis melalui konsep *validity claims*, di mana komunikasi ideal harus memenuhi klaim kebenaran, ketepatan normatif, dan kejujuran ekspresif. Dalam temuan penelitian ini, klaim kebenaran relatif lemah karena minimnya penggunaan data empiris, sementara klaim normatif dan ekspresif justru mendominasi, sebagaimana tercermin dalam pola komentar yang bersifat emosional dan generalisasi.

Meski demikian, Habermas mengaitkan ruang publik dengan pembentukan opini publik. Dalam penelitian ini, memahami bagaimana opini publik terbentuk atau dipengaruhi melalui komunikasi publik yang terjadi di platform X. Penyebaran informasi lewat platform X ini sudah membentuk opini publik sendiri di mana saat ini publik mengetahui bagaimana konflik penetapan tersangka pada kasus Amsal Sitepu bisa membongkar praktik dugaan kecurangan di ranah aparat penegak hukum.

PEMBAHASAN

Teori Public Sphere Jürgen Habermas

Konsep public sphere (ruang publik) merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh dari pemikiran Jürgen Habermas dalam kajian komunikasi, politik, dan media. Dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962/1989), Habermas menjelaskan bahwa ruang publik adalah wilayah dalam kehidupan sosial di mana warga negara dapat berkumpul untuk mendiskusikan persoalan-persoalan umum secara bebas, setara, dan rasional. Ruang ini menjadi tempat terbentuknya opini publik (*public opinion*) yang idealnya tidak didominasi oleh kekuasaan politik maupun kepentingan ekonomi.

Habermas menelusuri kemunculan ruang publik modern pada abad ke-18 di Eropa, khususnya melalui kafe, salon, dan media cetak seperti surat kabar. Dalam ruang tersebut,

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik: (Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

masyarakat borjuis berdiskusi mengenai isu-isu publik secara kritis terhadap negara. Dari sini, muncul konsep bahwa legitimasi kekuasaan politik seharusnya dibentuk melalui diskursus publik yang rasional, bukan semata-mata melalui otoritas.

Lebih lanjut, Habermas merumuskan beberapa karakteristik utama dari ruang publik ideal, yaitu akses universal: setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; kesetaraan partisipan: tidak ada dominasi kekuasaan dalam diskusi; diskursus rasional-kritis: argumen didasarkan pada logika, bukan emosi atau kepentingan sempit; otonomi dari negara dan pasar: ruang publik tidak dikontrol oleh kekuasaan politik atau ekonomi

Dalam kerangka ini, Habermas juga mengembangkan konsep *communicative action* (tindakan komunikatif), yaitu interaksi sosial yang bertujuan mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*), bukan sekadar memengaruhi atau mendominasi pihak lain (Habermas, 1984; 1987). Tindakan komunikatif menjadi fondasi normatif dari ruang publik yang sehat.

Namun demikian, Habermas juga mengkritik perkembangan ruang publik modern yang mengalami degradasi. Ia menyebut adanya “*refeodalisasi ruang publik*”, yaitu kondisi ketika media massa dan institusi besar (negara dan korporasi) mengambil alih ruang diskursus publik. Dalam situasi ini, komunikasi publik tidak lagi bersifat dialogis, melainkan menjadi satu arah dan manipulatif.

Gagasan tentang Dunia-Kehidupan dan Kolonisasi Sistem Terhadapnya

Gagasan Habermas lainnya yang penting untuk membangun teori tindakan komunikatifnya adalah gagasan ontologi sosial yaitu dunia kehidupan (*Lebenswelt*). Gagasan ini dikembangkan dalam jilid kedua dari bukunya yaitu *The Theory of Communicate Action*. Habermas membagi dunia modern dalam dua kategori, yakni dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) dan sistem.

Gagasan Habermas tentang dunia-kehidupan diinspirasi dari Husserl. Dunia-kehidupan di sini dimengerti sebagai suatu horizon berupa anggapan, keyakinan, atau pengetahuan melatarbelakangi seseorang untuk bersikap atau bertindak merespons situasi hidupnya secara pra-reflektif. Dengan kata lain dunia-kehidupan memberi landasan orang untuk bersikap atau bertindak tanpa memakai kesadaran atau pertimbangan reflektifnya. Dunia-kehidupan menjadi suatu wadah untuk menampung gagasan atau nilai-nilai yang diyakini membentuk latar belakang masing-masing orang yang terlibat dalam praktik komunikasi. Suatu diskusi atau percakapan rasional yang melahirkan kesepakatan tidak berangkat dari cakrawala kosong tetapi masing-masing peserta sudah membawa serta keyakinan atau pengetahuan yang dapat melatarbelakangi dan memberi warna pada seluruh isi diskusi. Singkat kata, bagi Habermas dunia-kehidupan berperan penting sebagai landasan tindakan komunikatif (Habermas, 1987).

Habermas membedakan dunia-kehidupan dengan sistem. Sistem merupakan dunia di mana manusia membangun hubungan yang bersifat fungsional, dan dengan itu melakukan tindakan rasional instrumental. Yang termasuk ke dalam sistem misalnya mekanisme birokrasi politik dan ekonomi. Lewat birokrasi politik dan ekonomi, manusia menjalankan fungsi-fungsi dalam hidupnya. Dalam sistem, uang dan kekuasaan politik berfungsi sebagai sarana reproduksi material.

Melalui teori kritisnya, Habermas menyelidiki penyakit masyarakat modern. Baginya, penyakit masyarakat modern terutama adalah kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem. Sistem yang berlaku dalam masyarakat mendominasi dan menguasai dunia-kehidupan, sedemikian rupa sehingga uang dan politik mengendalikan kehidupan. Dalam situasi ini, rasio jatuh menjadi rasio instrumental belaka yang menindas. Sistem yang berperan terlalu dominan ini menghancurkan dunia-kehidupan. Ketika uang dan birokrasi politik begitu berkuasa, sementara nilai-nilai tidak lagi bermakna, hidup manusia modern menjadi terasing. Manusia modern ditindas oleh kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem.

Pandangan tentang Demokrasi dan Ruang Publik

Habermas memberi pengertian mengenai ruang publik (*public sphere*) yaitu akses yang terbuka untuk semua warga masyarakat (Rudi, 2023). Ruang publik ini bukanlah suatu tempat yang bersifat fisik, organisasi atau institusi administratif tertentu, melainkan suatu “kondisi” yang memungkinkan arus opini dan aspirasi publik warga masyarakat dilakukan dalam situasi bebas, kritis, inklusif, dan tanpa paksaan atau tekanan apapun. Di dalam ruang publik, setiap warga masyarakat dapat berpartisipasi secara setara, serta bebas dan terbuka untuk memberikan opini atau gagasannya.

Ruang publik itu menjadi ruang yang berdiri sendiri, bebas dari campur tangan kekuasaan politik maupun ekonomi. Karena tidak ada kepentingan birokrasi dan ekonomi yang mengintervensi ke dalamnya, maka ruang publik menjadi ruang untuk membangun komunikasi antar warga masyarakat. Mereka dapat berargumentasi secara mandiri, bahkan untuk mengkritik pemerintah. Melalui ruang publik, warga masyarakat juga dapat membentuk solidaritas bersama untuk mengawasi dan mengevaluasi pemerintah, atau bahkan memberi perlawanan atas hegemoni pemerintah.

Ruang publik membutuhkan media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau koran dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyatakan opini dalam ruang publik. Media massa idealnya bersifat independen dari kekuasaan pemerintah maupun pasar, sehingga melalui itu masyarakat dapat mempublikasikan aspirasi dan opini mereka untuk tujuan perubahan sosial ke arah yang lebih baik

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik: (Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

Kritik dan Pengembangan Teori Public Sphere

Seiring perkembangan zaman, teori Habermas tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama datang dari Nancy Fraser (1990), yang menyatakan bahwa konsep ruang publik Habermas terlalu ideal dan tidak memperhitungkan ketimpangan sosial seperti gender, kelas, dan ras. Fraser memperkenalkan konsep “subaltern counterpublics”, yaitu ruang publik alternatif yang dibentuk oleh kelompok marginal untuk mengekspresikan kepentingan mereka.

Selain itu, para sarjana media digital juga mengkritik bahwa model ruang publik Habermas sulit diterapkan secara utuh dalam konteks kontemporer yang sangat kompleks. Media modern tidak lagi bersifat netral, melainkan terfragmentasi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ideologis, politik, dan ekonomi.

Meskipun demikian, teori Habermas tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk menilai kualitas diskursus publik, termasuk dalam konteks media sosial. Dengan kata lain, teori ini tidak selalu menggambarkan realitas, tetapi memberikan standar ideal untuk mengevaluasi apakah suatu ruang komunikasi mendukung demokrasi deliberatif atau tidak.

Transformasi Ruang Publik di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan terhadap konsep ruang publik. Internet dan media sosial membuka kemungkinan terciptanya ruang publik baru yang lebih inklusif dan partisipatif. Platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube memungkinkan individu untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten (prosumer).

Manuel Castells dalam *The Rise of Network Society* berpendapat bahwa masyarakat kontemporer mengalami pergeseran ke arah masyarakat jejaring (network society) berbasis teknologi informasi. Castells menyelidiki pergeseran bentuk komunikasi, yaitu dari bentuk komunikasi melalui media elektronik tradisional hingga media baru yang merupakan perpaduan teknologi internet, telekomunikasi seluler dan media massa.

Perkembangan teknologi internet membawa pemahaman baru tentang ruang publik. Zizi Papacharissi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi internet memunculkan kemungkinan untuk memperluas gagasan tentang ruang publik, yaitu ruang publik virtual yang memungkinkan diskursus politik dilakukan di dunia maya di antara orang-orang yang saling terhubung secara global dengan kemudahan akses untuk memperoleh data. Media sosial digunakan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu sebagai sarana untuk mengutarakan gagasan dan aspirasi kritisnya secara independen dan otonom melalui komunikasi dalam dunia maya.

Dalam konteks ini, media sosial sering disebut sebagai “digital public sphere”. Beberapa karakteristik ruang publik digital antara lain interaktivitas tinggi, penyebaran informasi yang cepat

dan luas, partisipasi publik yang relatif terbuka dan minimnya gatekeeping dibandingkan media tradisional.

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan serius terhadap kualitas diskursus publik. Alih-alih menjadi ruang deliberatif yang rasional, media sosial sering kali dipenuhi oleh polarisasi opini, penyebaran disinformasi, echo chamber (ruang gema) dan dominasi algoritma.

Algoritma media sosial memainkan peran penting dalam menentukan konten yang dilihat pengguna. Hal ini berpotensi menghambat terbentuknya diskursus yang beragam dan rasional, karena pengguna cenderung hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan preferensi mereka. Dalam perspektif Habermas, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari tindakan komunikatif menuju tindakan strategis, di mana komunikasi digunakan untuk memengaruhi, membangun citra, atau memenangkan opini publik, bukan untuk mencapai konsensus rasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa diskursus di platform X dalam kasus Amsal Sitepu belum sepenuhnya mencerminkan ruang publik ideal sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, karena interaksi yang terjadi lebih banyak didominasi oleh komentar yang bersifat emosional, subjektif, dan cenderung melakukan generalisasi, sehingga menunjukkan adanya distorsi komunikasi dalam ruang publik digital, termasuk fenomena echo chamber yang membuat pengguna lebih sering berada dalam lingkungan opini yang seragam dan pada akhirnya membatasi keterbukaan terhadap perbedaan pandangan serta melemahkan kualitas dialog yang rasional dan kritis. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial tetap memiliki potensi positif, di mana tekanan opini publik yang terbentuk di platform X dapat meningkatkan perhatian publik dan mendorong respons dari institusi terkait, sehingga menunjukkan bahwa media sosial masih dapat berfungsi sebagai ruang artikulasi suara masyarakat. Dengan demikian, media sosial bersifat ambivalen, karena di satu sisi membuka ruang partisipasi yang luas, namun di sisi lain kualitas diskursusnya masih dipengaruhi oleh emosi, algoritma, dan penguatan opini yang seragam, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan literasi digital, mendorong sikap kritis pengguna, serta memperkuat budaya diskusi yang lebih rasional, terbuka, dan berbasis argumentasi agar media sosial dapat lebih mendekati fungsi idealnya sebagai ruang publik yang sehat.

Saran

Penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menyarankan agar kajian-kajian selanjutnya yang menggunakan perspektif ruang publik Jürgen Habermas lebih memperhatikan dinamika ruang publik digital secara kontekstual, khususnya bagaimana algoritma, budaya partisipasi pengguna, serta fenomena echo chamber

Analisis Dilema Diskusi Di Era Digital, Ruang Publik atau Arena Konflik: (Analisis Habermas dalam Kasus Amsal Sitepu pada Platform X

memengaruhi kualitas rasionalitas diskursus, sehingga konsep ruang publik tidak hanya dipahami secara normatif-ideal, tetapi juga dikembangkan menjadi kerangka analisis yang lebih adaptif terhadap karakter media sosial kontemporer. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperluas pendekatan dengan mengintegrasikan teori komunikasi digital dan kajian media baru untuk memperkaya analisis mengenai perubahan pola interaksi publik di era platform digital.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital bagi pengguna media sosial agar mampu berpartisipasi secara lebih kritis, rasional, dan tidak mudah terjebak dalam informasi yang bersifat emosional atau bias kelompok, serta mendorong platform seperti X untuk lebih transparan dalam pengelolaan algoritma yang berpotensi memperkuat echo chamber. Di sisi lain, institusi pendidikan, media, dan lembaga publik juga perlu berperan aktif dalam membangun budaya diskusi yang sehat melalui edukasi etika komunikasi publik, sehingga media sosial dapat berfungsi lebih optimal sebagai ruang publik yang inklusif, deliberatif, dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuqren, A. (2023). The Contemporary Public Sphere. *Advances in Social Sciences Research Journal*.
- Castells, M. (2010). *The Information Age, Economy, Society and Culture, Vol. I: The Rise of Network Society* (2nd Ed.). Wiley-Blackwell.
- De Angelis, G. (2021). Habermas and Democracy. *Sage Journals*.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. *Social Text*, 25/26, 56-80.
- Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Habermas, J. (2022). Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik [A new structural transformation of the public sphere and deliberative politics]. Suhrkamp.
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. Routledge.
- Jemadin, S., & Tahamin, A. (2026). DEMOKRASI DELIBERATIF HABERMAS DAN PROBLEMATIKA IDEOLOGI DI RUANG PUBLIK DIGITAL. In *Veritate Lux : Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 9(1), 15–

27. <https://doi.org/10.63037/ivl.v9i1.183> Kellner, D. (2024). Habermas and the Public Sphere in the Digital Age. *Cultural Politics*.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Papacharissi, Z. (2002). The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere. *New Media & Society*, 4(1), 9-27.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford University Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Prasutomo, E., et al. (2019). Public Sphere in Indonesian Context. *Jurnal Fuaduna*.
- Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change. *Foreign Affairs*, 90(1), 28-41.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. *Media and Communication*, 1(1), 2-14.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.
- Zaidatul Azkiya, Ananda, et al. No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. (2025). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 , 3(1), 239-244. <https://doi.org/10.62379/tmgtme16>